



# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan *Master Plan* Pemerintah Indonesia untuk periode 2014 sampai dengan 2019, pembangunan infrastruktur merupakan skala prioritas dari program yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Program tersebut nyata terealisasi yang tergambar dalam kenaikan anggaran dari tahun 2014 sebesar 114 triliun menjadi 110 triliun ditahun 2019. Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan melibatkan peran perusahaan konstruksi baik dari swasta maupun BUMN, yang dalam hal ini dapat menimbulkan persaingan bisnis. Untuk menyasiasi hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk membuka ruang yang lebih luas kepada pengusaha lokal, pengusaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan maksud agar membatasi perusahaan plat merah yang bergerak dibidang jasa konstruksi untuk tidak memborong seluruh proyek infrastruktur tersebut. Dasar utama dari pembatasan ruang BUMN adalah pada penanaman modal asing yang dinilai akan terhambat jika BUMN terlalu mendominasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam lingkup perseroan, BUMN juga didefinisikan sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, hal tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 pasal 12b yang menyebutkan bahwa tujuan BUMN adalah mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Dari penjelasan kedua paragraf diatas, muncul suatu kontradiksi dalam pemerataan pekerjaan proyek pembangunan pada pihak swasta dengan suatu persaingan yang timbul guna merealisasikan tujuan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dampaknya sangat mungkin terjadi adanya praktik *window dressing* dalam laporan keuangan BUMN sebagai penilaian suatu keberhasilan operasional dalam satu tahun, yang jika dikerucutkan dalam aturan undang undang adalah laba bersih beserta komponen-komponen pembentuknya dan relasinya dengan pertumbuhan aset perusahaan dalam laporan keuangan.

Salah satu komponen pembentuk laba adalah pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama operasionalnya selama satu periode tertentu. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai arus kas masuk bruto dari berbagai kegiatan normal perusahaan yang dapat mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal selama satu periode. Oleh karena itu pendapatan merupakan akun beresiko tinggi. Komponen tersebut telah diatur baik mulai dari pencatatan sampai dengan penyajiannya dalam laporan keuangan. Untuk menjamin keandalan informasi dari suatu laporan keuangan, peran auditor sangat diperlukan dalam mengetahui apakah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



perusahaan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Maka dari itu, tugas auditor adalah untuk menguji apakah laporan keuangan yang disajikan manajemen telah memenuhi asersi-asersi yang diantaranya adalah tentang keberadaan atau ketersediaan (*existence or occurrence*), kelengkapan (*completeness*), hak dan kewajiban (*rights and obligations*), penilaian atau alokasi (*valuation and allocation*), dan juga penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*).

Selama kurang lebih tiga bulan melaksanakan aktivitas magang di KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK), penulis ditempatkan di PT KV, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konsultan teknik dan manajemen. Sebagai perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan jasa konsultasi teknik dan manajemen, dimana perusahaan akan melakukan tata ruang dan pemetaan pada sebuah proyek pembangunan, dibutuhkan cara pemahaman atas pengakuan pendapatan sesuai Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, pendapatan merupakan akun yang beresiko tinggi. Dimana pendapatan yang merupakan komponen pembentuk laba dapat digunakan sebagai bahan penilaian suatu keberhasilan operasional dalam satu tahun. Akun piutang yang merupakan bagian dari siklus pendapatan pada PT KV juga merupakan akun yang menarik, dimana sesuai dengan standar operasional prosedur PT KV, sebelum menerima pembayaran, PT KV mengakui pendapatannya sebagai piutang usaha sebesar persentase pekerjaan yang telah dikerjakan. Untuk itu, KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK) harus memastikan bahwa piutang usaha telah dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis akan mengangkat judul “Audit atas Pendapatan Usaha PT KV” yang akan membahas mengenai penerapan prosedur audit terhadap akun pendapatan usaha PT KV. Selain itu, penulis juga akan menganalisis apakah kebijakan akuntansi terhadap akun pendapatan pada PT KV telah sesuai dengan standar operasional perusahaan yang berlaku di PT KV.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, penulis mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai Audit atas Pendapatan Usaha PT KV. Selanjutnya dalam penulisan ini, penulis mengajukan beberapa rumusan masalah penelitian untuk tercapainya penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengakuan pendapatan usaha pada PT KV?
2. Apakah kebijakan akuntansi terkait pendapatan usaha di PT KV telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apakah prosedur pengakuan pendapatan yang dilakukan telah memenuhi asersi guna meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara andal?
4. Apakah KAP Hertanto, Grace, Karunawan telah melaksanakan prosedur audit sesuai dengan Standar Audit yang berlaku?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



### 1.3 Tujuan

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk :

1. Menjabarkan sistem pengakuan pendapatan usaha di PT KV.
2. Menguji pelaksanaan kebijakan akuntansi terkait pendapatan usaha PT KV sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menguji kewajaran penyajian laporan keuangan khususnya akun pendapatan usaha dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menguraikan proses audit yang dilakukan KAP Hertanto, Grace, Karunawan terhadap pendapatan usaha PT KV sesuai Standar Audit yang berlaku.

### 1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya di bidang audit.
2. Bagi akademik  
Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Institut Pertanian Bogor mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.
3. Bagi Pembaca Laporan  
Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam akuntansi, khususnya mengenai prosedur audit.
4. Bagi Mahasiswa  
Untuk memperoleh ilmu baru dan pengalaman terkait audit pendapatan usaha.
5. Bagi Perusahaan  
Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan di masa yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk membantu kelancaran perusahaan, khususnya terkait pendapatan usaha.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Audit

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

